

Pelayanan Keuangan Mikro Kepada Kelompok di Wilayah Perdesaan (Suatu Pengalaman P4K) ^{*/}

Departemen Pertanian, sesuai dengan mandatnya, telah menaruh perhatian dan upaya yang serius untuk menciptakan lingkungan perdesaan dan pertanian yang progresif sehingga ekonomi rakyat memperoleh ruang dan iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu upaya khusus yang dijalankan Departemen Pertanian yang secara langsung berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat, salah satunya melalui Proyek P4K, di mana pengelolaannya berada dalam tanggung jawab Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, adalah Proyek P4K.

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K) merupakan suatu upaya khusus yang dikelola **Departemen Pertanian** bekerja sama dengan **Bank Rakyat Indonesia** di dalam membimbing dan membantu keluarga-keluarga miskin di perdesaan, sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

P4K lahir sebagai suatu respon terhadap situasi yang berkembang pada dekade 70-an. Program pembangunan diakui telah membawa banyak perubahan, terutama sekali dengan semakin tersedianya beragam kesempatan yang bisa dikelola oleh masyarakat guna memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraannya. Tapi bagi sebagian yang lain, mereka yang hidup dalam ketertinggalan, mereka yang hidup dibawah garis maya kemiskinan, kesempatan yang tersedia terasa sulit mereka jangkau.

Dua Jalur Pendekatan P4K

P4K menempuh dua jalur pendekatan dalam membantu menanggulangi kemiskinan di perdesaan, yakni pendekatan pembangunan sumberdaya manusia melalui serangkaian proses pemberdayaan petani-nelayan kecil, dan pendekatan pelayanan keuangan mikro guna mendukung bertumbuh-kembangnya usaha-usaha mikro dan usaha keluarga di perdesaan.

1. **Jalur pembangunan sumberdaya manusia/pemberdayaan.** Pembangunan sumberdaya manusia (*human resources development*), didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup: (i) investasi dalam

^{*/} Disampaikan dalam Workshop “*Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indonesia*”, tanggal 27 Agustus 2004 di Jakarta.

sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapabilitas produktifnya; (ii) pemanfaatan sumberdaya manusia tersebut untuk memproduksi hasil-hasil yang meningkat; dan (iii) partisipasi masyarakat di dalam menikmati manfaat pembangunan. Pada dasarnya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sumberdaya manusia/pemberdayaan dimulai dengan membantu penduduk miskin agar makin sadar, percaya diri dan menghargai potensi yang dimilikinya. Tahap berikutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk miskin, serta menjamin bahwa kebutuhan hidup standar mereka dapat tercapai, yang di antaranya mencakup bagaimana menyediakan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan pendapatan.

Pada jalur ini, P4K memobilisasi petugas-petugas pendamping yang *notabene* adalah para Penyuluh Pertanian di tingkat lapangan, untuk bersama-sama masyarakat berusaha membantu keluarga-keluarga miskin *menumbuhkan kesadaran, membangkitkan keinginan, dan memperkuat kepercayaan diri* mereka bahwa mereka mampu mengatasi masalah kemiskinan yang mereka hadapi dengan kekuatan mereka sendiri. Untuk proses pemberdayaan ini, P4K sampai saat ini telah memobilisasi sejumlah **4.097 penyuluh pertanian** di 9.550 desa. Jumlah seluruh penyuluh pertanian di tingkat perdesaan saat ini mencapai 37.288 orang, sehingga sebenarnya masih tersedia potensi yang besar untuk memobilisasi mereka sebagai petugas pendamping dalam rangka penanggulangan kemiskinan, bila program seperti ini dikembangkan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah .

Ada beberapa tahap yang dilakukan petugas-petugas pendamping ini di lapangan. *Pertama*, mereka memilih lokasi (desa) yang memiliki potensi kemiskinan tinggi, antara lain dicirikan dari tingginya populasi penduduk miskin, infrastruktur desa yang masih lemah, terbatasnya akses kepada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di luar. *Kedua*, memfasilitasi proses *participatory rural appraisal* (PRA) yang dilakukan oleh masyarakat untuk menemukan rumahtangga-rumahtangga miskin sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh masyarakat sendiri. *Ketiga*, memfasilitasi dan memotivasi keluarga-keluarga miskin tersebut untuk mau mengatasi masalah secara bersama-sama dalam wadah kelompok kecil yang beranggotakan 5–16 orang (saat ini diperbesar menjadi 15-25 orang) yang didasarkan atas adanya afinitas di antara mereka. *Keempat*, memfasilitasi proses penguatan kapasitas kelompok, sehingga anggota kelompok mampu mengelola kelompoknya, membangun visi bersama, menumbuhkan kebiasaan

menabung dan kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga, memulai dan mengembangkan usaha mikro yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, serta memperkuat jejaring antar kelompok ataupun lembaga keuangan mikro yang dimiliki dan dikelola oleh mereka sendiri.

Penumbuhan dan pengembangan kelompok-kelompok swadaya telah terbukti merupakan instrumen yang efektif bagi penduduk miskin untuk mampu keluar dari kemiskinan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dukungan kepada kelompok swadaya menyediakan kesempatan bagi penduduk miskin untuk membangun kepercayaan dirinya. Demikian pula, dinamika kelompok-kelompok seperti itu dapat memperkuat proses pembelajaran dan menyediakan sarana untuk berbagi pengalaman.

2. **Jalur pelayanan keuangan mikro.** Pada jalur yang lain, P4K juga berusaha mendekatkan kesempatan yang selama ini sulit dijangkau oleh keluarga-keluarga miskin di perdesaan, khususnya dalam bidang pelayanan keuangan mikro yang diperlukan oleh penduduk miskin. Pelayanan keuangan mikro diperlukan untuk membantu kelompok swadaya memobilisasi tabungan dan akses kredit untuk menambah pembiayaan usaha kelompok yang mendukung usaha keluarga dan usaha mikro mereka. Mendorong mobilisasi tabungan, kendatipun berjangka pendek, telah terbukti amat efektif di dalam membantu penduduk miskin mengakumulasi modal kerja mereka, di mana hal itu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemandirian mereka.

Bekerjasama dengan BRI, dikembangkan suatu skema kredit mikro dengan kemudahan khusus (tanpa agunan), dengan tingkat suku bunga mendekati suku bunga pasar, yaitu 22,15% per tahun (1% *flat* per bulan). Pada sisi ini BRI bertindak sebagai bank pelaksana (*executing bank*), dimana keputusan apakah suatu usulan pengajuan kredit disetujui atau ditolak sepenuhnya merupakan kewenangan bank. Putusan pencairan pinjaman dikeluarkan setelah melalui beberapa tahapan. Begitu aplikasi kredit diajukan ke BRI, dalam bentuk RUA/RUB, pihak bank meneliti kelengkapan administratifnya, kemudian petugas *account officer*-nya melakukan pemeriksaan *on the spot* di lapangan, meliputi eksistensi dan kesehatan kelompok, usaha mikro yang dikelola setiap anggotanya, dan kelayakan pengembangan usaha yang diusulkan.

Skema kredit yang disediakan dirancang sebagai skema kredit yang berdimensi edukasi dengan tahapan kredit sebagai berikut: (i) tahap pertama maksimum sejumlah Rp 500.000 per anggota kelompok; (ii) tahap kedua maksimum sejumlah Rp 1.000.000 per anggota kelompok; (iii) tahap ketiga

maksimum sejumlah Rp 1.500.000 per anggota kelompok; dan (iv) tahap keempat maksimum sejumlah Rp 2.000.000 per anggota kelompok.

Dengan pola seperti ini, maka implikasi dari disetujuinya suatu pengajuan pinjaman/kredit, misalnya kemungkinan kredit macet dan tunggakan meninggi, menjadi tanggung jawab pihak bank untuk mengatasinya. Pilihan ini ditempuh untuk membiasakan para petani-nelayan kecil berada pada kondisi normal, sehingga setelah proses fasilitasi selesai (*program withdrawal*), mereka dapat akses secara mandiri ke dalam *mainstream* ekonomi secara normal.

Melalui pendekatan dua jalur yang tak terpisahkan ini, P4K senyatanya berusaha untuk mengembangkan suatu sistem dan mekanisme penanggulangan kemiskinan yang menjamin bila kesempatan berusaha datang kepada keluarga-keluarga miskin di perdesaan, maka mereka mampu meraihnya dan mengelolanya guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup mereka.

Kebutuhan Kerjasama

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keuangan mikro kepada kelompok, kebutuhan kerjasama diperlukan terutama dalam aspek :

1. Layanan financial dari Bank untuk pengembangan usaha anggota kelompok, motivasi kelompok, gabungan kelompok dan koperasi.
2. Dukungan layanan status hukum kelembagaan dari organisasi para petani/nelayan kecil sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya.
3. Tehnologi tepat guna.
4. Informasi pemasaran/perizinan dan akses pasar dalam berbagai skala.

Pembelajaran Pengalaman P4K Dalam Pelayanan Keuangan Mikro

1. Kredit sebagai instrumen pemberdayaan perlu dipahami sebagai suatu *Sarana Pembelajaran* bagi kelompok dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu perkembangan pemberian kredit pada kelompok harus mengacu kepada pola pengembangan kapasitas kelompok secara utuh. Kelompok harus mampu terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk mengelola kredit, sebagai modal usaha.
2. **Pendekatan kelompok** merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam membangun kepercayaan, dengan bergabung dalam kelompok mereka memiliki kemampuan *mengelola* kredit, tidak hanya sekedar *menerima* penyaluran kredit.

3. Pelayanan keuangan mikro harus *didahului* dan *dibarengi* dengan proses penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok secara terus-menerus.
4. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa Gabungan Kelompok sebagai embrio LKM yang ada di P4K memiliki kapasitas dalam “*self financing*” dan “*self generating capital*” yang diharapkan bisa menjamin keberlanjutan manfaat yang diterima oleh anggota kelompok. Oleh karena itu, Gabungan Kelompok (embrio LKM) didorong untuk mampu memberikan pelayanan financial hanya kepada anggotanya sebagai halnya koperasi. Untuk memenuhi aspek legalitas Gabungan didorong untuk berkembang dalam wadah koperasi sebelum UU LKM lahir.

**Pelayanan Keuangan Mikro Kepada
Kelompok di Wilayah Perdesaan
(Suatu Pengalaman P4K)**

**OLEH
WIDAYATI**



**DEPARTEMEN PERTANIAN
2004**